

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**RENCANA KERJA KECAMATAN PANGKALAN
KOTO BARU TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	27
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
 BAB IV : RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	
DAERAH.....	33
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	33
 BAB V : Penutup.....	38

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	27
Tabel 3.3	Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	30
Tabel 4.2	Rencana Keptuhan Pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2025	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 dilandasi oleh semangat otonomi Daerah Dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Menurut azas Otonomi dan azas dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meingkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keaneka ragam sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah , Sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan



RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pembuatan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 ini adalah untuk :

- 1) Untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026 dan Pedoman Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025
- 2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025.
- 3) Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2025
- 4) Sebagai Pedoman dan acuan pembuatan RKA/ DPA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 ini terdiri dari Lima Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landas Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Tulisan



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.5 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang dikritisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berdudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi sektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025 melaksanakan 4 urusan yaitu;

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keempat urusan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam 15 bentuk kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pangkalan Koto Baru TA. 2023 diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 7 + 9	11 = (10 / 4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	61,25	66	69,75	105,7	67	136,75	1,95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 7 + 9	11 = (10 / 4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,30	90,88	96,10	90,89	94,58	96,20	187,09	1,94
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,30	90,88	96,10	90,89	94,58	96,20	187,09	1,94
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	70%	75%	100%	133,3%	80 %	180	1,8%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	100%	70 %	75%	100 %	133,3 %	80%	180	1,8%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	70%	75%	100%	133,3%	80%	180	1,8%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	100%	70%	75%	100%	133,3%	80%	180	1,8%

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023 dan realisasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada



pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	IKU PD	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	v	50	64	66	67	68	70	61,25	69,75	68	70	Nilai AKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah meningkat dari tahun sebelumnya.
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	v	40%	70%	75%	80%	100%	100%	75 %	100	100%	100%	Pemberdayaan telah mencapai target 100 %
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	v	96,04	96,05	96,10	96,20	96,25	96,30	90,88	90,89	96,25	96,30	Nilai IKM sudah meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal.
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah.
- 5) Kurang terfasilitasinya Lembaga Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat
- 6) Bimtek-bimtek dan sosialisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak bisa dilaksanakan karna kurangnya pendanaan untuk kecamatan.
- 7) Ada Nagari yang tidak menetapkan APB-Nagari Tepat waktu
- 8) Keberadaan BUMNAG sekedar untuk memenuhi tuntutan peraturan tapi tidak dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat



2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah.

Kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kemampuan para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendalian pembangunan, dengan demikian pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional termasuk di Kantor Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Beberapa jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah pemberian Registrasi terhadap surat-surat Kependudukan, seperti Register Legaliasi, Pernyataan Domisili, Keterangan Meninggal Dunia, ahli waris, proposal beasiswa, izin usaha, lokasi usaha, surat pindah, SKTM, dispensasi Nikah, dan surat-surat keterangan lainnya.

Pelayanan Selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Perbup Nomor 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat.

Selain itu dalam pelayanan terdapat Pemerintahan Nagari Pihak Kecamatan melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dengan melakukan kegiatan



Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari/Peraturan Wali Nagari, Administrasi Nagari, Perencanaan Pembangunan Nagari dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Pelayanan yang diberikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru kami akui masih belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan disebabkan oleh aspek pendukungnya belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti efisiensi berkaitan dengan kurangnya disiplinnya pegawai yang terlambat datang ke kantor serta sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

2.3.2. Permasalahan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

- a) Dana Desa/Nagari yang telah mulai dikururkan pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu berdampak semakin tingginya beban kerja Wali Nagari bersama dengan aparaturnya yang ada di nagari. Minimnya SDM dan kurangnya pemahaman aparaturnya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini terutama dalam penatausahaan keuangan, mewajibkan pemerintah yang lebih atas/OPD terkait dapat hendaknya mengadakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Wali Nagari dan aparaturnya.
- b) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
- c) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- e) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.



2.3.3. Dampak

Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri.

Cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang pemerintahan, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisisnya. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan kegiatan tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menggunakan analisis S.W.O.T dengan proses sebagai berikut:

Kekuatan dari Lingkungan Internal yakni:

- Visi dan misi yang jelas.
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan (Anggaran rutin) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan.
- Adanya sarana-prasarana.

Kelemahan dari lingkungan Internal yakni:

- Jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang.



- Penempatan SDM yang belum tepat sasaran.
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya.
- Sarana dan prasarana kurang.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Belum lahirnya SOP secara optimal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.
- Belum tepat sasaran sosialisasi setiap regulasi yang lahir kepada masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.

Tantangan dari Lingkungan Eksternal

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai.
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.
- Belum tersedia anggaran yang cukup.
- Tidak seimbangnya birokrasi pemerintahan legislative dan eksekutif di wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Peluang dari Lingkungan Eksternal

- RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan.
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- Diklat peningkatan kualitas aparatur.
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan strategis.



Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.



- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
4. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Akhir RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.633.811.007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.633.811.007	
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 16.092.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 16.092.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 2.573.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 2.573.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.695.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.695.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.410.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.305.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.305.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen DPA SKPD					Penyusunan Dokumen DPA SKPD				
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.210.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.210.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 5.899.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 5.899.000	
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 1.431.649.475	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru			Rp 1.431.649.475	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.423.538.375	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.423.538.375	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 5.309.100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 5.309.100	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.802.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.802.000	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 2.780.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 2.780.000	
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 2.780.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 2.780.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 14.070.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 14.070.000	
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	18 Paket	Rp. 9.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	18 Paket	Rp. 9.000.000	
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 5.070.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 5.070.000	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 75.513.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 75.513.100	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp 3.350.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp 3.350.000	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 7.746.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 7.746.100	
04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 5.421.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 5.421.000	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 58.446.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 58.446.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 14.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 14.250.000	
02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	17 unit	Rp 14.250.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	17 unit	Rp 14.250.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 25.246.432	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 25.246.432	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 10.000.000	
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 15.046.432	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 15.046.432	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 54.210.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 54.210.000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 51.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 51.480.000	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 2.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 2.730.000	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 12.860.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 12.860.000	
3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.410.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.410.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa'	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 4.410.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 4.410.000	
3.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 8.450.000			Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 8.450.000	
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	200 keluarga	Rp. 8.450.000	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	200 keluarga	Rp. 8.450.000	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 34.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 34.650.000	
5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pangkala Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru			
01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 34.650.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 34.650.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah				Rp 1.681.321.007					Rp 1.681.321.007	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru di Tahun 2025 tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari pemangku Kepentingan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
	N	I	H	I	L



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2025 meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan, penguatan daya saing usaha
4. Pemangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Percepatan Pembangunan IKN dan Pelaksanaan Pemilu 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu atau hasil yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Tujuan :

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Tujuan :

- Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan
- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- b. Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan.
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.



Indikator Sasaran :

- Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk Rencana Kerja tahun 2025 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama visi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Terkait dengan program ini maka program pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dikelompokkan ke dalam 3 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.



Tabel 3.1
Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel

		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
		2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel 3.2

**RENCANA KERJA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

NAMA OPD : Kecamatan Pangkalan Koto Baru
URUSAN : Urusan Kewilayahan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
x	x	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100%	Rp.1.633.811.007	DAU			Rp1.763.737.375
x	x	0	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	20%	Rp 16.092.000	DAU	IKU OPD		Rp 18.499.000
x	x	0	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 1.431.649.475	DAU			Rp 1.532.538.375
x	x	0	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 2.780.000	DAU	Rutin OPD		Rp 3.080.000

x	x	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 14.070.000	DAU			Rp 15.570.000
x	x	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp. 75.513.100	DAU			Rp 92.300.000
x	x	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 14.250.000	DAU			Rp 16.000.000
x	x	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 25.246.432	DAU			Rp 27.750.000
x	x	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 54.210.000	DAU			Rp 58.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	78%	Rp 12.860.000	DAU			Rp 14.000.000
7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 4.410.000	DAU			Rp 5.000.000

7	0	0	2.0		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru		Rp 8.450.000	DAU			Rp 9.000.000
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	78%	Rp 34.650.000	DAU			Rp 38.000.000
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 34.650.000	DAU			Rp 38.000.000
TOTAL									Rp. 1.681.321.007				Rp 1.815.737.275

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025 tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Renja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
 - a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) .
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju Lima Puluh Kota yang madani Madani Beradat dan Berdudaya.
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru disajikan pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
RENCANA KERJA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
	7.01	KECAMATAN						1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-			100 %	1.633.811.007,00						-	1.763.737.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	-			20 %	16.092.000,00			-	-	-	-	18.499.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.573.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.800.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.695.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	5.899.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.899.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD</i>	-			20 %	1.431.649.475,00			-	-	-	-	1.532.538.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/bulan	1.423.538.375,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.523.538.375,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	5.309.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Laporan asset semester dan akhir tahun</i>	-			1 Dokumen	2.780.000,00			-	-	-	-	3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.080.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN</i>	-			20 %	14.070.000,00			-	-	-	-	15.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				18 Paket	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				15 Dokumen	5.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.570.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Umum</i>	-			20 %	75.513.100,00			-	-	-	-	92.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.746.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			8.300.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.421.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58.446.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	14.250.000,00			-	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	14.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	25.246.432,00			-	-	-	-		27.750.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			250.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.046.432,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	-			20 %	54.210.000,00			-	-	-	-	58.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	51.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan fasilitas musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa	-			78 %	12.860.000,00			-	-	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	-			20 %	4.410.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	4.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	8.450.000,00			-	-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	8.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca	-			78 %	34.650.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	-			6 Nagari	34.650.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	34.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	J U M L A H							1.681.321.007,00							1.815.737.375,00	



BAB V

P E N U T U P

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021-2026.

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO